



KR-Surya Adi Lesmana

MENARA PANTAU TELANTAR: Menara pantau Pos 1 Gunung Merapi di Kepuharjo Cangkringan Sleman tampak dalam kondisi telantar, Kamis (30/9). Menara pantau yang berlokasi di titik terdekat dengan puncak Merapi tersebut dulu difungsikan sebagai pos pengamatan aliran lahar di Kali Gendol. Kini menara tersebut tak terawat karena tak lagi difungsikan.

LACAK RUTE EVAKUASI SAMPAI TITIK KUMPUL Aplikasi Sipandu Merapi Mulai Disosialisasikan

SLEMAN (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman melakukan sosialisasi aplikasi Sipandu Merapi di Puri Mataram Beran Tridadi Sleman, Kamis (30/9). Aplikasi ini merupakan strategi penanganan dan upaya mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi dengan memanfaatkan teknologi.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sleman ST Haenry Dharma Widjaja mengatakan, aplikasi Sipandu Merapi dapat diakses pada sistem operasi Android. Adapun manfaat dari aplikasi ini untuk mengetahui informasi terkait status dan bahaya bencana erupsi Gunung Merapi, mengetahui lokasi dan jarak lokasi pengguna dari radius bahaya Gunung Merapi dan menentukan rute evakuasi dan titik kumpul terdekat dari lokasi pengguna.

"Penggunaan aplikasi ini juga untuk mengetahui 'sister village' dari desa-desa tangguh bencana di Kabupaten Sleman serta mengetahui batas administrasi dan jumlah penduduk perdesa di Kabupaten Sleman. Sipandu Merapi dibuat untuk mitigasi dan evakuasi warga maupun wisatawan yang ada di KRB Merapi.

Apabila ada sirene dan masyarakat mengaktifkan aplikasi ini, akan dipandu untuk menuju titik kumpul," jelas Haenry.

Asekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Aji Wulantara menyambut baik langkah BPBD Sleman dalam pengembangan aplikasi Sipandu Merapi. Menurutnya, kebencanaan membutuhkan suatu tindakan reaksi yang begitu cepat, tidak hanya dari sumber daya manusianya saja, namun juga membutuhkan bantuan teknologi.

"Aplikasi ini dari sisi namanya saja Sipandu artinya mengarahkan, artinya tentunya aplikasi ini digunakan untuk memperoleh informasi yang cepat ketika Merapi itu Erupsi, atau ada hal-hal yang mengganggu ketentraman masyarakat di lereng Merapi," ujarnya.

Aji berharap aplikasi Sipandu Merapi ini juga dapat melindungi warga masyarakat di lereng Merapi maupun wisatawan melalui kecepatan informasi yang diberikan. "Berbagai aplikasi saya kira di Sleman bukan suatu yang baru, namun saya harap ini terus dikembangkan, digali apa yang perlu diwujudkan setiap OPD untuk mendukung tugas teknisnya," tambahnya. (Has)-f

Vaksinasi Dosis Kedua di Gereja Pringwulung



KR-Franz Boedisukamanto

Suasana vaksinasi dosis kedua di Basement Gereja Katolik St Yohanes Rasul Pringwulung.

DEPOK (KR) - Gereja Katolik Santo Yohanes Rasul Pringwulung Depok bekerjasama dengan Kantor Staff Presiden (KSP), TNI-Polri dan Dinas Kesehatan menggelar Vaksinasi

si Belarasa Covid-19, Kamis (30/9) pagi. Kegiatan ini merupakan vaksinasi dosis kedua setelah vaksinasi dosis pertama digelar 2 September 2021. "Dosis kedua dengan

kuota 1.000 orang diikuti umat Katolik Gereja Pringwulung juga warga sekitar serta mahasiswa luar kota yang kos di Pringwulung dan Mrican," ucap Pastor Paroki Romo Rosarius Sapto Nugroho Pr.

Rm Sapto menegaskan, sebagai bagian warganegara dan bangsa Indonesia Dewan Paroki St. Yohanes Rasul Pringwulung bertekad untuk turut menyelesaikan persoalan bangsa bersama elemen masyarakat lainnya. "Saat ini kita menghadapi pandemi Covid-19 yang harus kita hadapi bersama dengan percepatan vaksinasi juga disiplin prokes di masa adaptasi kebiasaan baru," tegasnya. (Vin)-f

Dicanangkan, Lapas Bebas Narkoba



KR-Istimewa

Penyerahan MoU pencanangan Lapas Bersinar.

MLATI (KR) - Bupati Sleman Kustini SP menghadiri pencanangan Lembaga Pemasarakatan Bebas Narkoba (Lapas Bersinar) di Lapas Kelas IIB Sleman, Kamis (30/9). Pencanangan deklarasi Bersinar merupakan komitmen untuk perang melawan narkoba, khususnya di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Wilayah Kemenkumham DIY.

"Pencanangan Lapas Bersinar sejumlah UPT Kemenkumham DIY ini sebagai tekad mewujudkan Lapas

yang bersih dari narkoba dan handphone beserta pirantinya," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DIY, Budi Arga Situngkir. Pada pencanangan tersebut juga dilakukan penandatanganan oleh seluruh UPT Kemenkumham DIY disaksikan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hiarij. Budi menuturkan, upaya tersebut direalisasikan dalam serangkaian kegiatan, salah satunya razia gabungan yang serentak dilakukan di se-

jumlah UPT Kemenkumham DIY bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman. Serangkaian kegiatan tersebut juga diiringi dengan pencanangan Lapas Bersinar yang dipusatkan di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Hari ini kami melengkapi seluruh UPT Kemenkumham DIY yang belum melaksanakan deklarasi Bersinar yang terdiri dari Lapas Kelas IIA Yogyakarta, Lapas Kelas IIB Sleman, Rutan Kelas IIB Wates, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, Bapas Kelas I Yogyakarta, Bapas Kelas II Wonosari, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rupbasan Kelas II Bantul dan Rupbasan Kelas II Wonosari. Sehingga total keseluruhan menjadi 16 UPT Kemenkumham DIY yang telah mendapat pengakuan dari BNNP DIY sebagai UPT Kemenkumham Bersinar," jelasnya.

Sementara Bupati menyampaikan apresiasi terhadap pencanangan Lapas Bersinar. "Pemkab Sleman turut mendukung sepenuhnya untuk mewujudkan wilayah Sleman yang bebas dari Narkoba," tegasnya. (Has)-f

JENJANG SD DIAMBIL 5 SEKOLAH TIAP KAPANEWON

Semua SMP Siap Laksanakan PTM

SLEMAN (KR) - Semua SMP di Kabupaten Sleman sudah siap melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas yang akan dimulai 4 Oktober 2021. Sekarang ini tinggal menunggu hasil verifikasi. Sedangkan untuk SD, nanti akan dilaksanakan PTM mulai minggu kedua bulan Oktober 2021.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana mengatakan, di Sleman ini ada 119 SMP dan semuanya menyatakan siap untuk melaksanakan PTM. Namun sebelum melaksanakan PTM, pihaknya akan melakukan verifikasi terlebih dulu.

"Kalau sudah diverifikasi dan memenuhi persyaratan, baru mereka (SMP) diizinkan melaksanakan PTM secara terbatas. Jika sekolah itu sudah siap, tapi menyatakan tidak melaksanakan PTM dulu ya tetap diperbolehkan," kata Ery di

kantornya, Kamis (30/9).

Dikatakan, pelaksanaan PTM akan dimulai minggu depan. Di mana pada 4-7 Oktober 2021, SMP akan melaksanakan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK). "Nanti itu ANBK khan siswanya datang ke sekolah. Meskipun hanya diwakili 45 siswa saja yang mengikuti ANBK," ucapnya.

Mengenai PTM untuk SD, menurut Ery, akan dimulai pada minggu kedua bulan Oktober 2021. Tidak semua sekolah dapat melaksanakan

PTM, namun setiap kapanewon hanya 5 sekolah yang dapat melaksanakan PTM. "Untuk SD nanti sampling dulu. Masing-masing kapanewon diambil 5 sekolah. Secara bertahap nanti akan ditambah sekolah yang melaksanakan PTM," paparnya.

Dalam pelaksanaan PTM nanti, dinas akan melakukan evaluasi setiap minggu atau dua minggu sekali. Evaluasi itu juga untuk menentukan bertambah tidaknya SD yang dapat melaksanakan PTM. "Nanti kami evaluasi secara berkala. Apakah ada kekurangan atau tidak dalam pelaksanaan PTM. Kemudian untuk SD, kalau bisa berjalan baik ya berarti bisa ditambah sekolah yang melaksanakan PTM. Yang jelas kami harus hati-hati jangan sampai menjadi klaster baru," pungkasnya. (Sni)-f

Kucing, Anjing dan Kera Ikut Vaksinasi Rabies



KR-Istimewa

Bupati Kustini menunggu vaksinasi rabies seekor kucing.

tanian sebanyak 500 dosis," jelasnya, kemarin.

Di samping itu, Pemkab Sleman juga mendapatkan tambahan jumlah dosis vaksin yang diberikan oleh Ikatan Dokter Hewan sebanyak 100 dosis. "Sebanyak 500 dosis vaksin kita siapkan untuk dibagi

di tiga wilayah yaitu Gamping sebanyak 242 dosis, Cangkringan 140 dosis dan Berbah 118 dosis. Sementara untuk vaksin yang diberikan oleh Ikatan Dokter Hewan sebanyak 100 dosis kita pakai sebagai cadangan bagi mereka yang datang dan

belum melakukan pendaftaran sebelumnya," kata Suparmono, seraya menambahkan, jumlah hewan peliharaan yang telah terdaftar untuk mengikuti vaksinasi rabies tersebut yaitu kucing sebanyak 446 ekor, anjing 51 ekor dan kera 3 ekor.

Bupati Kustini SP sempat meninjau langsung penyelenggaraan vaksinasi rabies di Puskesmas Gamping. "Vaksinasi rabies merupakan salah satu yang perlu diperhatikan untuk hewan peliharaan. Rabies ini juga merupakan virus yang berpotensi menular ke manusia, maka dari itu saya sangat mengapresiasi adanya penyelenggaraan vaksinasi rabies untuk hewan peliharaan," katanya. (Has)-f

RSA UGM Resmikan Sejumlah Layanan Baru

GAMPING (KR) - Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM meresmikan sejumlah layanan baru, yaitu Intermediate Care Unit Stroke serta Poliklinik Bisma (Klinik Layanan Gagal Jantung Terintegrasi), Kamis (30/9). RSA UGM juga membuka layanan laboratorium 24 jam bagi pengunjung umum serta membuka kembali ruang rawat inap VIP yang sebelumnya sempat dialihkan untuk mendukung pelayanan khusus Covid-19.

"Karena Covid-19 mulai mereda, ada layanan-layanan yang bisa segera dialihkan," kata Direktur Utama RSA UGM, Dr dr Darwito SH SpB(K)Onk.

Darwito mengungkapkan, RSA UGM berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat di DIY. Selain

menambah unit pelayanan baru, RSA UGM juga terus mengembangkan unit pelayanan yang telah berjalan. "Harapannya bisa kita tingkatkan, dan yang belum difungsikan bisa segera difungsikan karena masyarakat sangat membutuhkannya," imbuhnya.

RSA UGM juga berupaya untuk mempermudah akses bagi masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit,

baik yang berkaitan dengan waktu layanan maupun sistem informasi. Kemudahan akses, menurut Darwito menjadi salah satu kunci utama keberhasilan rumah sakit di samping aspek-aspek lain seperti kecepatan pelayanan. "Mulai sekarang disiapkan, saya yakin kita semua bisa. Harapannya RSA UGM semakin banyak berkiprah dan masyarakat bisa terlayani dengan baik,"

ungkapnya. Unit Stroke yang baru saja diresmikan terletak di Gedung Nakula 4, sedangkan Poliklinik Bisma terletak di Gedung Sadewa 3. Sementara itu layanan laboratorium 24 jam diberikan di Laboratorium Klinik Terpadu. RSA UGM nantinya akan membuka layanan laboratorium secara drive thru dan layanan tes swab 24 jam. (Dev)-f

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasarnya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp (0274)868413, Fax (0274) 868413

Gali Potensi Perempuan untuk Ketahanan Ekonomi Keluarga

SLEMAN (KR) - Ekonomi masyarakat dan keluarga harus tetap bangkit, meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Salah satunya dengan menggali potensi perempuan untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman dari Fraksi PDI Perjuangan Sri Riyadiningsih SPd mengatakan, sejatinya perempuan mempunyai power dalam menjaga dan meningkatkan ekonomi keluarga. Dimana potensi perempuan ini dapat dijadikan sebagai tumpuan pemulihan ekonomi keluarga akibat pandemi Covid-19.

"Perempuan itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Justru dalam situasi seperti ini, perempuan bisa menjadi tumpuan menjaga ketahanan ekonomi keluarga," kata Sri Riyadiningsih, Kamis (30/9).

Untuk menumbuhkan ekonomi keluarga dan masyarakat, perempuan yang sudah mempunyai usaha perlu dilakukan pembinaan dan pendampingan. Sedangkan bagi perempuan yang belum mempunyai usaha, bisa digali potensinya baik di bidang pertanian, perikanan, peternakan maupun lainnya.

"Bagi yang sudah memiliki usaha, bagaimana didorong agar lebih berkembang

Sri Riyadiningsih SPd
Anggota DPRD Sleman dari Fraksi PDI P



KR-Istimewa

Sri Riyadiningsih SPd

dan maju. Sementara yang belum, bisa diwadahi melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk menggali potensinya. Nanti bisa bergerak di berbagai bidang, tidak hanya sebatas pertanian saja," ujar perempuan aktif di bidang kesetaraan gender ini. Selanjutnya, pemerintah juga perlu melakukan pelatihan dan penguatan modal bagi perempuan yang memiliki usaha kecil. Selain itu juga memfasilitasi memasarkan produk usaha kecil masyarakat. "Pelaku usaha kecil itu juga perlu dilakukan pelatihan dan pemberian penguatan modal. Tujuannya untuk menambah skill mereka, termasuk memfasilitasi pemasaran secara online. Karena pada masa pandemi seperti sekarang, pemasaran secara online sangat penting," ucap perempuan warga Jombor Sinduadi. Di samping itu, anggota Komisi A ini juga meminta kepada pemerintah untuk lebih memperbanyak melakukan sosialisasi tentang izin usaha secara Online Single Submission (OSS). Mengingat masih banyak pelaku usaha kecil kesulitan mengakses. "Kami rasa sosialisasi perlu diperbanyak lagi. Supaya masyarakat lebih paham dan mudah mengakses izin usaha," pintanya. (Sni)-f